

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi ini sering Membahas tentang bagaimana seseorang memperoleh wawasan dan pemahaman politik, sama dengan menelaah proses sosialisasi politik. sosialisasi politik dapat dinyatakan sebagai bagian dari proses sosialisasi pada umumnya.(Alex Inkeles,1969:8) selain itu sosialisasi menunjukkan proses dimana anak-anak atau generasi muda diperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang ada di masyarakatnya, dan bagaimana cara mereka mempelajari peran yang diharapkan kelak ketika berusia dewasa (Gabriel Almond,1974:11). Dari narasi tersebut, secara implisit menyiratkan ada pihak yang memberi pengajaran ke generasi muda dalam proses sosialisasi. Meski Almond tidak menyebut secara gamblang tetapi dapat disimpulkan pihak itu adalah generasi yang lebih tua. Dari beragam pengertian sosialisasi yang telah dijabarkan, benang merahnya adalah sosialisasi merupakan proses pengajaran yang diberikan kepada setiap individu sebagai anggota masyarakat. Semua individu tanpa terkecuali-suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar-akan mengalami sosialisasi sepanjang hidupnya. Meskipun dalam proses ini terdapat kecenderungan bahwa pada satu sisi, generasi muda akan bertindak sebagai pihak yang menerima pengajaran, sementara pada sisi yang lain, generasi yang lebih tua akan berperan sebagai pihak yang memberikan pengajaran.(Sosialisasi Politik, Gabriel A. Almond, 1974:11)

## 2. Sosialisasi politik

sosialisasi politik merupakan proses yang berdimensi politik, sehingga politik bisa dimaknai sebagai sebuah pengetahuan, nilai, bahkan keterampilan. Paralel dengan pendapat tersebut, (Kenneth P. Langton 1969:13) mengungkapkan bahwa "political socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits its political culture from generation to generation." Pemahaman atas budaya politik yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya memang relatif longgar. Akan tetapi, ungkapan Langton bisa dimaknai ketika masyarakat dapat memperoleh nilai, keyakinan, sikap, atau perilaku politik. sosialisasi politik menurut para ahli

### a. Dennis Kavanagh

sosialisasi politik merupakan proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik dimasyarakat

### b. Sigel

sosialisasi politik adalah proses pembelajaran secara gradual tentang sikap dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan dalam system politik yang Tengah berlangsung, selain itu sigel juga menerangkan bahwa ini harus dijalani oleh setiap individu agar memiliki kemampuan yang memadai di Masyarakat

### c. Greensteil

sosial politik ini secara sederhana dapat dimaknai sebagai pembelajaran politik yang diberikan melalui seseorang agen yang dimengerti tentang politik untuk menanamkan informasi, nilai, nilai dan Tindakan politik (greensteil 1968:17)

## 3. Pemilih Pemula

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula memiliki peran penting dalam sistem demokrasi karena mereka membawa perspektif dan semangat baru ke dalam proses pemilihan. (Ali Ismail Shaleh 2019)

Pada Usia dan Kelayakan Pemilih pemula biasanya adalah mereka yang baru pertama kali mencapai usia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, yang umumnya 17 atau 18 tahun tergantung pada negara, Pendidikan Pemilih Pemilih pemula sering kali membutuhkan pendidikan pemilih khusus untuk memahami proses pemilu, hak-hak mereka, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Program pendidikan pemilih biasanya mencakup informasi tentang bagaimana mendaftar untuk memilih, cara memberikan suara, dan pentingnya pemilu dalam sistem demokrasi. Pemilih pemula memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan karena mereka mewakili generasi baru dengan perspektif dan kepentingan yang mungkin berbeda dari pemilih yang lebih tua. (Ali Ismail Shaleh 2019)

Partisipasi aktif mereka dalam pemilu bisa membawa perubahan dalam kebijakan dan arah pemerintahan. Pemilih pemula sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu, apatisme politik, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik. Upaya untuk mengatasi tantangan ini termasuk melalui

pendidikan politik di sekolah, kampanye oleh organisasi masyarakat sipil, dan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

#### **4. Peran Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran penting dalam sosialisasi pemilu, khususnya bagi pemilih pemula. Beberapa faktor yang melatarbelakangi peran KPU dalam hal ini adalah:

**Pendidikan Politik:** Pemilih baru seringkali kurang memahami proses dan pentingnya pemilu. KPU bertugas memberikan pendidikan politik agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi. **Partisipasi Aktif:** KPU berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Sosialisasi yang efektif dapat mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya secara aktif.

**Membangun Kesadaran:** Banyak pemilih pemula yang belum menyadari betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan negara. KPU berperan dalam membangun kesadaran tersebut melalui berbagai program sosialisasi.

**Mengatasi Sikap Apatitis:** Beberapa pemilih pemula mungkin merasa apatis atau acuh tak acuh terhadap politik. KPU berupaya mengatasi sikap tersebut dengan memberikan informasi yang menarik dan relevan. **Memanfaatkan Teknologi:** KPU memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial yang familiar bagi pemilih pemula untuk menyampaikan informasi seputar pemilu. Hal ini dilakukan agar informasi lebih mudah diakses dan diterima oleh generasi muda.

**Kerjasama dengan Institusi Pendidikan:** KPU sering bekerjasama dengan sekolah dan universitas untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, seperti seminar, diskusi dan simulasi pemilu. **Memberikan Informasi yang Transparan:**

KPU memastikan bahwa informasi mengenai pemilu, seperti daftar calon, tata cara pemilu, dan jadwal pemilu, tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh semua pemilih, termasuk pemilih pemula.

Kampanye Anti Golput: KPU juga melakukan kampanye untuk melawan sikap golput (tidak memilih) yang banyak ditemui di kalangan pemilih pemula. Dengan berbagai faktor tersebut, KPU berupaya memastikan pemilih pemula dapat mengikuti pemilu secara sadar, bertanggung jawab, dan aktif.

## **5. Pemilihan umum**

### **a. Pemilu**

Pemilu merupakan suatu ajang kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat (Pamungkas:2009). Dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terdapat pada konstitusi negara republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 2 ayat 1 Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". "Kedaulatan ada di tangan rakyat" dalam hal ini berarti rakyat mempunyai hak menentukan nasib sendiri, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih secara demokratis pemimpin yang membentuk pemerintahan untuk memerintah dan melayani dan memilih 28 seluruh lapisan masyarakat. anggota parlemen untuk mengontrol pemerintahan yang sedang berlangsung. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksudkan dilakukan melalui pemilu, agar rakyat memilih wakil-

wakilnya yang akan menjalankan tugas pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, menjadikan undang-undang sebagai dasar persatuan seluruh partai. Dalam memenuhi kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pemenuhan kewajiban tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan secara rinci pengertian pemilu anggota parlemen.

Pemilu merupakan sarana mewujudkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, yang dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu adalah cara rakyat untuk mengarahkan pemerintahan dan menjadi lembaga demokrasi. Secara teori, pemilihan parlemen dianggap sebagai tahap paling awal dalam kehidupan konstitusi yang direvisi. Oleh karena itu, pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Saat ini, pemilu dianggap sebagai acara nasional yang penting. Hal ini karena pemilu secara langsung mempengaruhi semua orang. Melalui pemilu, masyarakat juga dapat menyampaikan keinginannya dalam bidang politik atau sistem kenegaraan. Alasan dan tugas pemilu sebagai bentuk demokrasi dan salah satu aspek demokrasi yang penting. Semua demokrasi modern memiliki pemilu. Tapi tidak semua pemilu adalah demokrasi. Karena pemilu yang demokratis bukan sekedar simbol, tapi pemilu yang harus kompetitif, reguler, inklusif (luas) dan definitif untuk menentukan pemerintahan

#### **b. Tata cara pemilu**

Konstitusi Republik Indonesia berbicara tentang suatu kekuasaan dan keberadaan desa yang merupakan bagian penting dari negara. Undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara mengakui 31 dan menghormati adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berikut juga hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat dan prinsip NKRI. Definisi desa adalah kumpulan kekuasaan yang memiliki otoritas politik karena merupakan bagian dari administrasi negara. Dalam pengertian politis ini, desa sering digambarkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Salah satu indikasi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam masyarakat politik adalah keikutsertaan mereka dalam pemilu. Bentuk pemilihan terkecil adalah pilkades, seperti yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter. Menurutnya, demokrasi didefinisikan sebagai metode politik, mekanisme pemilihan pemimpin. Secara historis, pilkades telah lama diselenggarakan dan bersifat langsung, universal, luberjurdil, serta dipahami sebagai pengakuan atas keragaman pandangan politik. Yang diijinkan di jelaskan melalui tatacara Pendaftaran Pemilih yang mana Proses di mana warga negara mendaftar untuk menjadi pemilih yang sah. Ini termasuk verifikasi identitas dan kelayakan mereka. Pendaftaran bisa dilakukan secara manual di tempat-tempat yang ditunjuk atau melalui sistem online yang disediakan oleh otoritas pemilu.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Setelah pendaftaran, data pemilih diverifikasi dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT adalah daftar resmi orang-orang yang berhak memberikan suara dalam pemilu dan merupakan acuan bagi penyelenggara pemilu dalam menyediakan logistik pemilu seperti surat suara dan

tempat pemungutan suara (TPS). Kampanye Pemilu Dimana Periode di partai politik dan kandidat mempromosikan diri mereka kepada pemilih melalui berbagai media Kampanye ini diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil dan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik. Pelaksanaan Pemungutan Suara yang mana Pemungutan suara biasanya dilakukan pada hari yang ditentukan secara nasional atau daerah. Pemilih datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Proses ini diatur secara ketat untuk memastikan kerahasiaan dan integritas suara.

Penghitungan Suara Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan suara dilakukan baik di TPS maupun di pusat penghitungan suara. Hasil penghitungan suara biasanya diumumkan secara bertahap dan dapat diawasi oleh saksi dari partai politik atau kandidat serta pengawas independen. Penetapan Hasil Pemilu Setelah penghitungan suara selesai, hasil pemilu diumumkan oleh otoritas pemilu. Hasil ini bisa ditinjau dan ditantang melalui mekanisme hukum yang disediakan jika ada dugaan kecurangan atau pelanggaran. Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu diawasi oleh lembaga independen dan badan pengawas pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mengatasi pelanggaran. Mekanisme penegakan hukum juga ada untuk menangani kasus kecurangan, intimidasi, atau pelanggaran lainnya yang mungkin terjadi selama proses pemilu.

**c. Pemilu menurut undang-undang**

Undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia. Secara resmi, di ketahui pada **Undang-undang Nomor 7 tahun 2017** (atau UU 7/2017). Undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 20 Juli 2017. adalah Tentang Pemilihan Umum



memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilih nya.

Dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

3. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 100 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

4. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

## B. Penelitian yang relevan

Adanya penelitian serupa yang dilakukan di masa lalu memegang peranan penting dalam penelitian karena keberadaan penelitian sebelumnya dapat membantu penulis saat ini dalam menulis penelitian yang mendasari penelitian tersebut. 34 Penelitian relevan yang pernah dilakukan tentang peran komisi pemilihan umum kabupaten Magetan dalam sosialisasi pemilu pada pemilih pemula antara lain:

Table 2.1 penelitian yang relevan

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa Putri (2019), dari Universitas Lampung	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam	adalah Komisi Pemilihan Umum melakukan suatu program-program kegiatan yang	Membahas terkait kegiatan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula	penelitian yang dilakukan oleh annisa Putri dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang dilakukan

		<p>Peningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 dimana masalah yang diangkat adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.</p>	<p>mana berupa usahanya agar dapat mengajak pemilih pemula ikut berpartisipasi dalam pemilu, dan terbukti ada peningkatan partisipasi pemilih pemula, dengan strategi yang dilakukan dengan cara sosialisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya.</p>		<p>lebih fokus terhadap strategi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di bandar lampung sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan</p>
2	<p>Feby Ekanurul Afiah</p>	<p>Implementasi Pemenuhan Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas</p>	<p>menunjukkan pada umumnya pemenuhan hak yang diberikan oleh KPU</p>	<p>Membahas terkait pemilu</p>	<p>-penelitian yang dilakukan oleh Feby Ekanurul Afiah dengan penelitian ini yang</p>

		Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan 2024	Magetan pada penyangang disabilitas tunanetra berdasarkan undang-undang tahun 2017, yang telah diterapkan bawasanya dalam pemuhanannya masih kurang efektif		menjadi pembeda antara lain obyek yang dilakukan lebih fokus terhadap pemuhan pemilih bagi disabilitas sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan
3	Rega Alwa	Implementasi Analisis Perilaku Politik Masyarakat Dan Pengurus Partai Politik Dalam Pemilihan	menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa sudah menerapkan nilai demokrasi dengan memberi	Perilaku politik dalam pemilu	-penelitian yang dilakukan oleh Rega Alwa dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang dilakukan lebih fokus terhadap

		Kepala Desa Di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Tahun 2021.	kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dan antusiasme masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga sangat tinggi menandakan jika masyarakat masih memiliki kesadaran politik dalam bermasyarakat.		Implementasi Analisis Perilaku Politik Masyarakat Dan Pengurus Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan
4	Rahayu darwiyati	analisis peran badan kesatuan bangsa dan politik (KESBANG POL)	penyelenggaraan pemilihan umum sudah menerapkan nilai demokrasi dengan memberi kesempatan	Pemilihan umum	-penelitian yang dilakukan oleh rahayu darwiyati dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang

		pemerintahan kota madiun dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislative tahun 2019	masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dan antusiasme masyarakat dalam pemilu juga sangat tinggi menandakan jika masyarakat masih memiliki kesadaran politik dalam bermasyarakat		dilakukan lebih fokus terhadap analisis peran badan kesatuan bangsa dan politik (KESBANGPOL) pemerintahan kota madiun dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislative tahun 2019sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan
5	Irsyad Sudirman, Imam Muazansyah	efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum daerah Pada pemilihan pemula dalam	efektivitas sosialisasi berupa: Prosedur dan pemilihan tujuan, pemanfaatan sumber daya,	Sosialisasi pemilu pada pemilihan pemula	-penelitian yang dilakukan oleh Irsyad sudirman, dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang

		<p>pemilu kepala daerah Di masa pandemi covid 19</p>	<p>anggaran, sarana, prasarana, integrasi dan pencapaian tujuan, kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh KPUD Kabupaten Bulungan selama masa pandemic covid-19.</p>		<p>dilakukan lebih fokus terhadap efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum daerah Pada pemilih pemula dalam pemilu kepala daerah Di masa pandemi covid 19 sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan</p>
6	<p>Ester Ripka Inovatif</p>	<p>Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyadarkan Pemilih Pemula</p>	<p>Melalui Pemilu, memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan di cita-citakan</p>	<p>-peran KPU -pemilih pemula</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh Ester Ripka Inovatif, dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek</p>

		<p>Tentang Pentingnya Hak Suara</p>	<p>sehingga terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Masyarakat atau warga negara adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan terutama para</p>	<p>yang dilakukan lebih fokus terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyadarkan Pemilih Pemula Tentang Pentingnya Hak Suara sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan</p>
--	--	---	---	--



			pemilih pemula yang baru pertama kali menentukan hak pilihnya.		
7	Maslelah Pratama Putri	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur	diketahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur, KPU Provinsi Kalimantan	Peran KPU dalam pemilu dalam meningkatkan partisipasi	-tempat -waktu penelitian yang dilakukan oleh Maslelah Pratama Putri dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang dilakukan lebih fokus terhadap Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden

			<p>Timur telah melakukan Kegiatan sosialisasi interaksional (dilakukan dalam banyak program dan melibatkan beberapa elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan juga kepada pemilih pemula serta kelompok gender dan</p>	<p>2014 di Kalimantan Timur sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan</p>
--	--	--	---	---

			<p>disabilitas.) dan sosialisasi</p> <p>directional</p> <p>(media</p> <p>diantaranya</p> <p>melalui pamflet/ poster, brosur, spanduk,</p> <p>maupun melalui media informasi public seperti iklan layanan masyarakat yang disiarkan</p> <p>melalui media televisi, radio serta media cetak.)</p>		
8	Muhammad aziz zakirudin	Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan	<p>Proses dalam menuju pesta pemilihan umum tidak terlepas oleh intrik dan</p>	<p>-pemilu</p> <p>-partisipasi</p> <p>pemilih pemula</p>	<p>-waktu</p> <p>-tempat</p> <p>penelitian yang dilakukan oleh Muhammad aziz</p>

		Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula	isu-isu yang diframing oleh media dan disebarakan secara masif melalui media sosial.		zakirudin dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang dilakukan lebih fokus terhadap Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula sedangkan penulis melakukan penelitian untuk semua kalangan
9	Setyowati karyaning tyas	Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula	suara pemilih pemula ini juga rawan dimanfaatkan oleh oknum-	Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula	-waktu -tempat penelitian yang dilakukan oleh Setyowati

			<p>oknum yang sering menggunakan kampanye hitam untuk mendulang suara karena mereka belum memiliki literasi politik yang memadai dan cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Di tataran desa yang notabene tidak tersentuh sama sekali meskipun sudah ada himbuan dari KPU Pusat hingga</p>		<p>karyaningtyas dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang dilakukan lebih fokus terhadap Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula sedangkan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peran KPU dalam sosialisasi pemilu pada pemilih pemula</p>
--	--	--	---	--	---

			Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi		
10	Pamungkas, Sigit 2009	Perihal Pemilu	Kontribusi terpenting ini bagi kajian politik di Indonesia adalah gambarannya yang menyeluruh tentang berbagai aspek dalam pemilu, mulai dari regulasi (termasuk tata cara pemberian suara dan metode konversi suara menjadi kursi), peta partai politik,	pemilu	penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, Sigit dengan penelitian ini yang menjadi pembeda antara lain obyek yang dilakukan lebih fokus terhadap Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula sedangkan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peran KPU dalam sosialisasi pemilu

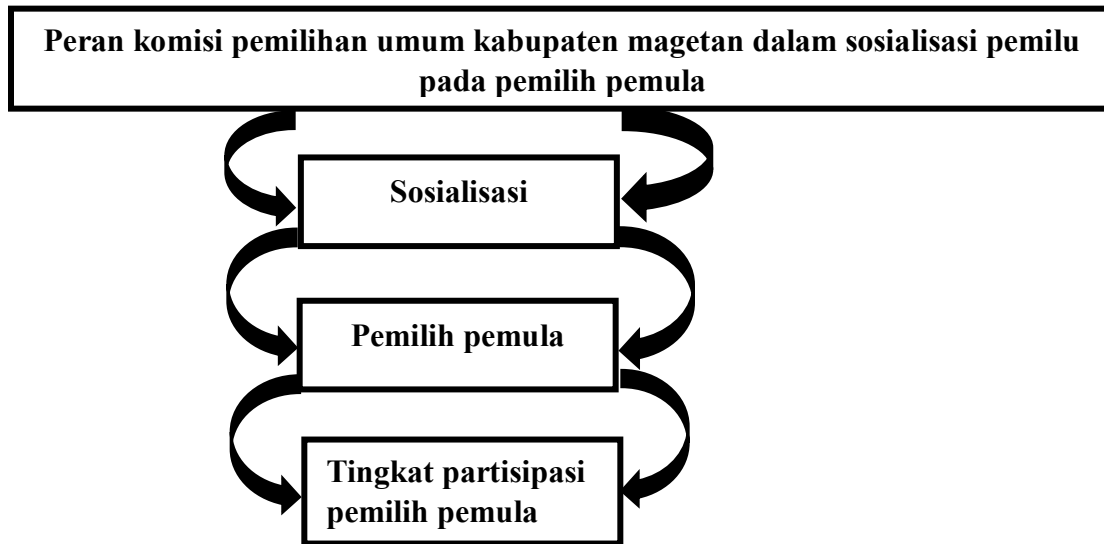
			<p>hingga konfigurasi politik yang dihasilkan oleh pemilu. Yang juga sangat esensial, buku ini menyajikan ulasan-ulasan teoritik tentang pemilu.</p>		<p>pada pemilih pemula</p>
--	--	--	--	--	----------------------------

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti terkait dengan Peran komisi pemilihan umum kabupaten Magetan dalam sosialisasi pemilu pada pemilih pemula. peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum yang ditunjukkan pada pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu.

Penelitian ini dilakukan peneliti juga untuk mengetahui apa yang melatar belakangi peran komisi pemilihan umum dalam sosialisasi pada pemilih pemula.

Maka penulis membangun kerangka pikir yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir